

Sekuritisasi Imigran Muslim dalam Kampanye dan Awal Pemerintahan Donald Trump Tahun 2015–2018

Rifandra Aulia Rachmadi¹, Virtuous Setyaka², Zulkifli Harza³

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹rifandramentopawiro@gmail.com, ²virtuoussetyaka@soc.unand.ac.id,
³zharza@soc.unand.ac.id

Abstract

This article examines the securitization of Muslim immigration in the United States from Donald Trump's 2015 presidential campaign to the Supreme Court's decision in Trump v. Hawaii in 2018. Rather than treating Trump's electoral victory or the issuance of the travel restrictions as sufficient evidence of successful securitization, the study conceptualizes audiences as multiple and active actors. It employs a qualitative case-study design and document analysis of Trump's campaign statement, Executive Order 13769, Executive Order 13780, Presidential Proclamation 9645, the Trump v. Hawaii opinion, and survey reports from the Pew Research Center and the Public Religion Research Institute. The documents are coded through the categories of securitizing actor, speech act, existential threat, referent object, functional actor, audience, and extraordinary measure. The findings show that Trump framed Muslim entry as a terrorism-related threat to the state and public safety and translated this framing into nationality-based entry restrictions. Audience acceptance, however, was fragmented: strong support emerged among Republicans and white evangelical Protestants, while most other religious groups, civil-society actors, and several courts opposed the policy. Securitization was therefore only partially successful. It mobilized Trump's political base and ultimately secured judicial authorization for Proclamation 9645, but it did not produce a uniform social consensus.

Keywords: Muslim, Immigrant, Securitization, Travel Ban, Donald Trump

PENDAHULUAN

Peristiwa 9/11 menjadi titik awal dimulainya kebijakan imigrasi Amerika Serikat (AS) yang lebih restriktif, terjadi transformasi besar terhadap kebijakan imigrasi sebagai respon nasional atas ancaman terorisme. Kebijakan *War on Terror* pada masa pemerintahan Presiden Bush berdampak signifikan terhadap imigran Timur Tengah dengan

mayoritas Muslim yang seringkali dianggap sebagai ‘teroris’. Secara tidak langsung, berdampak terhadap timbulnya Islamofobia terhadap imigran Muslim.

Selama bertahun-tahun, Donald Trump menggunakan ungkapan *radical Islamic terrorism*, memperkuat sinonim yang salah antara Muslim dan terorisme. *Council on American Muslim Relations* (CAIR) mencatat terjadinya kenaikan fenomena Islamofobia di Amerika Serikat sebesar 6-7% akibat pernyataan radikal Trump terhadap imigran Muslim. Trump menandatangani perintah eksekutif pertama, *Executive Order No. 13769* yang berjudul “*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry Into the United States*”.

Kebijakan tersebut merupakan implementasi janji kampanye untuk menanggukuhkan imigrasi dari kawasan dengan potensi terorisme. Kebijakan *Travel Ban* atau disebut juga dengan *Muslim Ban*, merupakan serangkaian kebijakan larangan perjalanan terhadap tujuh negara yang dianggap sebagai sumber ancaman terorisme. Negara-negara tersebut mayoritas berpenduduk Muslim yang berada di wilayah regional Timur Tengah yakni Suriah, Iran, Libya, Irak, Yaman, Sudan, dan Somalia. Meskipun Trump menegaskan kebijakan ini bukanlah diskriminasi terhadap agama tertentu, namun berfokus terhadap mengurangi faktor risiko.

Adanya upaya untuk menghambat imigran dengan identitas tertentu untuk memasuki Amerika Serikat dinilai bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara, termasuk sama haknya, termasuk hak setiap orang bebas berpindah ke tempat yang dikehendaki. Kebijakan *Travel Ban* memaksakan pengecualian secara menyeluruh daripada menganalisis keamanan individu para imigran, di situlah letak klaim diskriminasi daripada kontrol perbatasan yang sah itu sendiri. Negara yang seharusnya menjadi tempat untuk menjamin keamanan beserta kesetaraan masyarakat malah melakukan tindak diskriminasi. Amerika Serikat sebagai negara yang menganut nilai demokrasi menyalahi

nilai demokrasi itu sendiri dengan kebijakan *Travel Ban* terhadap imigran Muslim.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman anggapan individu atau kelompok masyarakat dan berfokus pada peristiwa alami, nyata, subjektif, untuk memperoleh makna daripada perluasan data. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analisis bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap peristiwa yang terjadi berdasarkan data dan fakta di lapangan. Penulis mendapati bahwa proses sekuritisasi isu imigran di mulai dilakukan sejak masa kampanye hingga terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke-45. Penelitian ini dibatasi sejak masa kampanye pada tahun 2015 hingga diresmikannya *Travel Ban* pada tahun 2017.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku yang ditulis oleh Barry Buzan, Ole Waever, & Jaap de Wilde yang berjudul, "*Security: A New Framework for Analysis*". Peneliti akan menjelaskan tahapan sekuritisasi isu imigran Muslim di Amerika Serikat periode pemerintahan Donald Trump. Untuk mendapatkan informasi mengenai topik pembahasan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, sekuritisasi merupakan tindakan mengonstruksi suatu isu dengan keamanan sebagai alasan utama, dan melibatkan tindakan politisasi oleh aktor untuk mengangkat isu tersebut ke tahap yang lebih tinggi sehingga melegitimasi untuk pengambilan respon diluar politik normal atau dengan menggunakan langkah ekstrim. Dalam sekuritisasi terdapat dua tahap krusial yakni pemunculan isu dan tahap meyakinkan

audiens. Berhasil atau tidaknya sekuritisasi tergantung pada kemampuan aktor dalam mengolah suatu isu sehingga dianggap penting dan mempengaruhi konsensus audiens.

1. Ancaman Eksistensial Imigran Muslim Amerika Serikat

Sebuah isu dapat dilabeli mengancam meskipun kenyataannya tidak mengancam, *speech act* merupakan cara yang digunakan aktor untuk untuk membingkai isu keamanan. *Speech act* atau tindak ujar sebagai sarana penindak yang bersifat deklaratif dan performatif yang tidak hanya menggambarkan realitas tapi juga menciptakan realitas baru. Dalam sekuritisasi imigran Muslim Amerika Serikat, Trump sebagai presiden merupakan aktor dominan dalam menyampaikan retorika anti-imigran dan mengasosiasikan Muslim sebagai ancaman terorisme yang membahayakan keamanan nasional beserta individu di dalamnya.

Sentimen keamanan di Amerika Serikat terkait imigran dari Timur Tengah merupakan dampak dari Tragedi 9/11. Trump melihat imigran Muslim sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, hal tersebut berkaitan dengan sudut pandang politiknya yang konservatif, nativis, dan populis. Hal tersebut sejalan dengan sudut pandang partai yang mengusungnya, yakni partai Republik yang tradisional dan cenderung tertutup terhadap multilateralisme. Pemerintahan Trump memposisikan imigran Muslim sebagai ancaman eksistensial (*existensial threat*) terhadap keamanan nasional.

Pernyataan Trump yang disampaikan kepada publik menggambarkan imigran dari negara Muslim sebagai sumber terorisme. Trump mengabaikan aspek historis AS sebagai bangsa imigran serta fakta sejarah bahwasanya imigran Muslim telah ada di Amerika Serikat sejak era *Atlantic Slave Trade* pada tahun 1800. Selain itu, institusi Muslim yang telah lama ada dan berkembang seperti *Moorish Science Temple* dan *Nation of Islam*, menandakan eksistensi Muslim telah lama menjadi bagian dari komposisi

masyarakat Amerika Serikat.

2. Diskursus Keamanan Trump Terhadap Ancaman Imigran Muslim

Keterlibatan Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan strategis dan ideologis dalam konflik di Timur Tengah pada dekade 80 hingga 2000, menjadi titik awal tenggelamnya AS dalam pusaran politik kontra terorisme global. Pergantian rezim di beberapa negara di Timur Tengah yang tidak sejalan dengan kepentingan AS mengakibatkan dinamika dan konflik bersenjata. Meskipun demikian, AS melihat berbagai konflik tersebut sebagai ancaman eksistensial yang tidak penting dibandingkan ancaman Soviet. Hingga terjadinya Tragedi 9/11, kelompok radikal Al-Qaeda menyerang Pentagon dan *World Trade Center* (WTC). Terorisme yang semula dipahami sebagai isu marginal pasca Perang Dingin, menjadi prioritas restruktur kebijakan di dalam dan luar negeri Amerika Serikat. *Global War in Terror* merupakan respon keamanan terhadap ancaman kelompok radikal sekaligus fase penting perubahan paradigma terorisme global yang diasosiasikan dengan isu agama pada periode 2000-an.

Meskipun *War on Terror* bertujuan untuk mengeliminasi aktivitas teror global, terdapat variabel lain yang tidak bisa dikontrol yaitu terkait persepsi ancaman teroris imigran Muslim. Pada tahun 2016, pemerintahan Donald Trump kembali memberlakukan kebijakan keras terkait Muslim setelah upaya pemerintahan Obama meredam gejolak Islamofobia pasca Tragedi 9/11. Trump menilai, sikap Obama yang membuka keran imigrasi meningkatkan potensi masuknya paham radikal oleh imigran dari negara rawan konflik, terlebih konflik di Timur Tengah sedang memanas akibat kelompok ISIS. Trump membingkai imigran Muslim sebagai musuh bersama terhadap kepentingan negara.

Trump menyampaikan *speech act*, menggiring opini publik terkait ancaman imigran Muslim. Sebagai calon kandidat presiden Amerika Serikat 2016, Trump menggunakan isu ini untuk menghimpun dukungan. Media

sosial Twitter berpengaruh besar bagi Donald Trump dalam menyampaikan opini tanpa bergantung pada media mainstream, dikarenakan opini kontroversial memiliki peluang lebih besar dalam mengundang perdebatan. Narasi yang disampaikan Trump melalui medium bahasa, memainkan peran penting dalam politik identitas *we vs them* untuk membangun rasa solidaritas bersama dan memobilisasi dukungan dari kalangan konservatif. Trump menganggap bahwa Muslim sebagai sumber kejahatan yang mengancam keamanan masyarakat.

3. Media Konservatif Membingkai Isu Imigran Muslim

Kemunculan isu terorisme ke ranah publik tidak muncul begitu saja, media dan pers memiliki andil sehingga sebuah topik menjadi pembicaraan di masyarakat. Media sebagai aktor yang berperan secara tidak langsung dalam proses sekuritisasi (*functional actor*) memainkan peran penting dalam membingkai sebuah isu. Menurut pantauan *Intelligence Media Management* (IMM), sepanjang tahun 2015, media internasional secara masif memberikan perhatian terhadap gerakan kelompok ekstrimis. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan aktivitas terorisme yang berkaitan dengan kelompok radikal *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

Bertepatan dengan tahun pemilu 2016, isu imigran menjadi isu krusial seiring dengan media yang menyoroti peningkatan gejolak konflik Timur Tengah, imigran dianggap menjadi sumber ancaman suatu negara. Untuk meraih atensi masyarakat dalam pemilu, Trump menjadikan imigran sebagai kambing hitam atas jatuhnya kejayaan Amerika Serikat. Hal tersebut memancing kontroversi ditengah publik, mendorong opini liar terhadap kaum imigran dan munculnya persepsi ancaman sehingga dibutuhkan langkah darurat diluar politik normal. Media memiliki peran penting dan signifikan dalam membingkai suatu isu dan menyampaikannya kepada audiens.

Media dan pers seharusnya bersikap netral dalam memberitakan suatu peristiwa, karena dapat mempengaruhi sudut pandang audiens dalam menyikapi suatu isu. Namun demikian, setiap media memiliki perspektif dan sudut pandang tersendiri, akibatnya media Amerika Serikat terpolarisasi dan terbagi dalam spektrum ideologis. Media konservatif seperti Fox News, Breitbart, The Daily Caller, cenderung mendukung diskursus keamanan Trump. Sementara media liberal seperti The New York Times, CNN, MSNBC, cenderung kritis dalam membela hak kelompok imigran termasuk Muslim.

4. Pemerintah Amerika Serikat Sebagai Aktor Sekuritisasi

Sekuritisasi merupakan proses intersubjektif antara aktor sekuritisasi (*securitizing actor*) dan audiens, di mana suatu isu dibingkai secara sosial sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan. Menurut Barry Buzan, proses ini tidak hanya melibatkan pembingkaiannya sebagai ancaman, tetapi juga tindakan tutur (*speech act*) yang berfungsi untuk meyakinkan audiens bahwa isu tersebut memerlukan penanganan darurat di luar prosedur politik normal. Dengan demikian, keberhasilan sekuritisasi ditentukan oleh sejauh mana aktor sekuritisasi mampu mengubah persepsi publik terhadap suatu isu hingga dianggap sebagai ancaman nyata.

Dalam konteks penelitian ini, aktor sekuritisasi yang dimaksud adalah pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Melalui berbagai pernyataan publik, Trump secara aktif mengonstruksi isu imigran Muslim sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Salah satu bentuk *speech act* yang menonjol adalah pernyataan kontroversial Trump pada tanggal 7 Desember 2015 yang menyerukan “*a total and complete shutdown of Muslims entering the United States*”. Pernyataan tersebut menandai awal terbentuknya wacana sekuritisasi terhadap imigran Muslim yang kemudian berujung pada implementasi kebijakan *Travel Ban*.

Selain peran langsung Trump sebagai aktor utama, terdapat pula *functional actors* yakni media konservatif dan kelompok pendukung “Trumpisme” yang berperan dalam memperkuat narasi ancaman melalui penyebaran retorika anti-imigran. Adapun *referent objects* dalam konteks ini adalah negara dan masyarakat Amerika Serikat yang dikonstruksikan sebagai pihak yang terancam oleh *existential threat* dari imigran Muslim. Proses ini menunjukkan bahwa sekuritisasi tidak hanya bergantung pada tindakan politik individu, melainkan juga pada dukungan diskursif dan legitimasi sosial dari berbagai aktor pendukung.

Wacana keamanan yang dibangun oleh Trump berakar pada ideologi *America First* dan slogan *Make America Great Again* (MAGA). Keduanya menekankan proteksi terhadap keamanan nasional, kemandirian ekonomi, serta pembatasan ketat terhadap imigrasi. Kebijakan ini mencerminkan paradigma unilateralisme yang menempatkan kepentingan nasional di atas kerja sama internasional. Selain itu, wacana tersebut turut memperkuat sentimen nativisme di tengah masyarakat Amerika, menciptakan polarisasi identitas antara warga asli dan kelompok imigran (*we vs them*).

Tokoh-tokoh lain seperti Michael Flynn dan Sebastian Gorka, juga berperan dalam memperkuat sekuritisasi terhadap imigran Muslim melalui retorika yang menyamakan Islam dengan sumber terorisme. Pandangan-pandangan tersebut semakin melegitimasi kebijakan diskriminatif seperti *Travel Ban* serta memperkuat persepsi publik bahwa imigran Muslim merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Donald Trump berhasil melakukan sekuritisasi terhadap isu imigran Muslim melalui kombinasi antara tindakan tutur, dukungan politik, serta pengaruh wacana publik yang berkelanjutan.

5. Legitimasi Audiens Terhadap Sekuritisasi Imigran Muslim

Teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Wæver,

dan Jaap de Wilde menjelaskan bahwa suatu isu dapat diubah menjadi isu keamanan melalui proses politisasi yang ekstrem. Aktor sekuritisasi berperan penting dalam membangun persepsi publik bahwa suatu hal merupakan ancaman eksistensial bagi negara, sehingga tindakan darurat di luar politik normal dapat dibenarkan. Dalam proses ini, penerimaan audiens menjadi elemen krusial karena legitimasi publik memberi dasar bagi pemerintah untuk bertindak secara luar biasa terhadap isu yang di sekuritisasi.

Dalam konteks pemerintahan Donald Trump, proses sekuritisasi tampak jelas melalui kebijakan-kebijakan imigrasi yang ia terapkan. Terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada tahun 2016 mencerminkan dukungan audiens terhadap visi politiknya yang proteksionis dan nasionalistik. Melalui slogan *MAGA* dan pernyataannya tentang imigran Muslim, “*a total and complete shutdown of Muslims entering the US*”, Trump memunculkan narasi bahwa imigran Muslim merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

Pada awal pemerintahannya, Trump mengeluarkan *America First Policy* sebagai kerangka utama kebijakan negara. Kebijakan ini menegaskan bahwa kepentingan nasional Amerika harus ditempatkan di atas segalanya dan setiap potensi ancaman harus dieliminasi bahkan sebelum benar-benar terjadi. Dalam implementasinya, kebijakan ini diwujudkan melalui serangkaian langkah seperti pembatalan program DACA yang melindungi imigran muda, penghapusan *Temporary Protected Status* (TPS) bagi warga dari negara-negara konflik, pengurangan kuota imigran, serta penerapan *Zero Tolerance Policy* yang memisahkan keluarga imigran di perbatasan.

Salah satu kebijakan kontroversial dari sekuritisasi isu imigran oleh pemerintahan Trump adalah *Travel Ban*. Kebijakan ini menangguhkan masuknya imigran dari tujuh negara mayoritas Muslim, yaitu Irak, Iran, Libya, Sudan, Somalia, Suriah, dan Yaman, dengan alasan menjaga

keamanan nasional dari ancaman terorisme. Pemerintah AS menilai negara-negara tersebut berpotensi mengekspor paham radikal yang dapat mengancam keamanan domestik. Namun, kebijakan ini menuai kritik luas karena dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi serta prinsip kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh Amerika Serikat.

Secara empiris, data menunjukkan bahwa aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal justru jauh lebih sedikit dibandingkan kasus teror domestik yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan dalam satu dekade terakhir. Oleh karena itu, *Travel Ban* dinilai berlebihan dan tidak didukung bukti keamanan yang memadai. Selain itu, keputusan Trump dianggap terburu-buru karena kebijakan tersebut tidak menilai keamanan berdasarkan individu, melainkan melakukan pengecualian menyeluruh terhadap negara tertentu. Hal ini menimbulkan klaim diskriminasi terhadap Muslim alih-alih upaya penguatan kontrol perbatasan yang sah.

Kebijakan *Travel Ban* mengalami beberapa revisi akibat penolakan publik dan gugatan hukum. *Travel Ban I* (Januari 2017) dinilai terlalu diskriminatif karena secara eksplisit melarang tujuh negara mayoritas Muslim. *Travel Ban II* (Maret 2017) kemudian menghapus Irak dari daftar larangan, sementara *Travel Ban III* (Juni 2017) menambahkan Chad, Venezuela, dan Korea Utara. Meskipun mengalami revisi, kebijakan tersebut tetap memicu kontroversi dan dianggap memperburuk citra Amerika Serikat di dunia internasional.

Dalam kerangka teori sekuritisasi, imigran Muslim diposisikan sebagai *existential threat* terhadap *referent object* berupa keamanan nasional dan masyarakat AS. Pemerintah AS bertindak sebagai aktor sekuritisasi, yang diwakili oleh Presiden Donald Trump, Michael Flynn, Sebastian Gorka, serta Partai Republik. Media berperan sebagai functional

actor yang memperkuat wacana ancaman melalui pemberitaan yang mengaitkan imigrasi dengan kejahatan dan terorisme.

Proses sekuritisasi berlangsung dalam dua tahap utama. Pertama, tahap kemunculan isu, di mana retorika anti-imigran menjadi semakin menonjol sejak masa kampanye 2016, membentuk opini publik bahwa imigran khususnya Muslim, merupakan ancaman bagi keamanan nasional dan identitas Amerika.

Kedua, tahap meyakinkan audiens, di mana aktor sekuritisasi menggunakan *speech act* dan kebijakan konkret untuk membangun legitimasi publik. Dalam hal ini, *Travel Ban* menjadi simbol tindakan darurat di luar politik normal yang dianggap lebih efektif dibandingkan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan *Travel Ban* dapat dipahami sebagai hasil konkret dari proses sekuritisasi terhadap isu imigran Muslim di bawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana retorika politik, dukungan publik, dan media dapat bersinergi dalam membentuk persepsi ancaman dan melegitimasi tindakan ekstrem dengan dalih keamanan nasional.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis sekuritisasi isu imigran di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump menggunakan teori sekuritisasi yang digagas oleh Buzan, Waever, dan Wilde dengan menggunakan lima indikator/unit untuk melihat bagaimana upaya sekuritisasi tersebut, yaitu adanya *referent object*, *securitizing actors*, *existential threat*, *functional actor*, dan audiens. Selain itu, Buzan juga memaparkan dua tahapan sekuritisasi yang terdiri atas tahap pemunculan isu dan tahap meyakinkan audiens. Hasil analisis menunjukkan jika pemerintah AS melakukan sekuritisasi isu imigran sebagai bentuk upaya lebih tegas dalam mengatasi masalah imigran yang dianggap membawa ancaman.

Berdasarkan konsep yang digunakan terlihat bahwa tahap pemunculan isu yang dilakukan pemerintah AS dilakukan dengan menjadikan isu imigran sebagai agenda utama dalam masa kampanye Trump, hingga menjadikan isu imigran sebagai agenda utama kebijakan AS pada masa pemerintahan Donald Trump. Tahap pemunculan isu juga tidak terlepas dari peran media yang juga cenderung mendukung narasi-narasi bahwa imigran adalah ancaman bagi keamanan negara dan segenap masyarakat AS, khususnya imigran Muslim yang diasosiasikan dengan ancaman terorisme. Kemudian, tahap meyakinkan audiens yang dilakukan oleh pemerintah AS yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden Donald Trump, Michael Flynn, Sebastian Gorka, melalui penyampaian serangkaian *speech act* di bidang keamanan yang menjadi masalah utama yang sering dikaitkan dengan isu imigran.

Tahap meyakinkan audiens juga dilakukan dengan mengeluarkan tindakan darurat atau aksi luar biasa di luar politik normal. Tindakan ini dikeluarkan dalam rangka membuktikan bahwa kebijakan imigrasi di masa sekarang lebih baik dari kebijakan di masa pemerintah sebelumnya yang dinilai tidak mampu mengatasi masalah imigran tersebut. Aksi luar biasa ini dilihat dari dikeluarkannya tindakan darurat larangan terhadap imigran dari tujuh negara dengan mayoritas Muslim melalui kebijakan *Travel Ban*.

Daftar Pustaka

- Barry buzan, Ole Waever, & Jaap De Wilde. "Security a New Framework for Analysis." USA: Lynne Rienner Publisher, 1998.
<https://www.academia.edu/35332225> (diakses 17 Agustus 2024)
- Anisa, Usman. (2021). "Sekuritisasi Isu Imigran di Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Donald Trump". Universitas Andalas.
- Yousef, Dalia. "Tracing the Trajectory: Exploring the Origins, Iterations, and Impacts of the Muslim Travel Ban Impacts of the Muslim Travel Ban." CUNY Academic Works, 2022.
- Kul, Yavuz. "Opportunities And Challenges Of International Migration For

- Sending And Receiving Countries.” *SAYI XXIV*, MFA Turkiye ,2022.
- Arafa, Mohamed. “A question to the President of the United States, Donald Trump: is it a Travel Ban, or a Muslim Ban, or a Travel Muslim Ban?” Indiana University School of Law, 2018
- Bayoumi, Moustafa. “This Muslims American Life: Dispatches from the War on Terror.” New York University Press, 2015.
<https://www.jstor.org/stable/j.ctt15zc812> (diakses 22 Agustus 2024)
- Jessica Bolter dkk. “Four Years of Profound Change : Immigration Policy during the Trump Presidency.” *Migration Policy Institute*, Washington DC, 2022.
- Pratiwi, Sundari Ayu. (2021). “American First: Kebijakan Donald Trump Dalam Pembatasan Kaum Imigran ke Amerika Serikat.” *Intermestic, Journal of Studies* Vol.6 (1), 2021.
- William Santoso, Yohanes. (2019). “Kecenderungan Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump.” Universitas Airlangga.
- Boorstein, Michelle. “At Baltimore Mosque, President Obama Encourages US Muslims: ‘You Fit in Here’.” Washington Post, 2016.
<https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/02/03/> (diakses 22 Agustus 2024)
- Fermor, Ben dan Jack Holland. “Security and polarization in Trump’s America: securitization and the domestic politics of threatening others.” *Global Affairs* 2020: 1-17, 2020.
<https://doi.org/10.1080/23340460.2020.1734958> (diakses 4 September 2024)
- Department of Homeland Security. “Yearbook of Immigration Statistics 2019.” <https://ohss.dhs.gov/topics/immigration/yearbook/2019> (diakses pada 16 Juli 2024)
- Zaitun Mukaromah, Muzani, & Muhammad Zid. “United States Government Policy Against Migrants (Muslims).” *Jurnal Mercatoria* 15 (2), 2022.

- <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7362> (diakses pada 22 Agustus 2024) Melati, Victoriana. "The Impact of Migration Securitization on The Increase of Islamophobia-Based Attacks in The United States in 2015-2019." *Indonesian Journal of International Relations* IV, 2020.
- Corbin, Caroline Mala. "Terrorist Are Always Muslim but Never White: At the intersection of Critical Race Theory and Propaganda." *Fordham Law Review* Vol. 86 (2), 2017. Diakses pada 4 Oktober 2024: <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5437&context=fllr> Rezkia, Arraf. "Analisis Kebijakan Travel Ban Oleh Donald Trump." *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Padjajaran 4(2): 227, 2018.
- Nowrasteh, Alex. "Terrorism and Immigration: A Risk Analysis." *Cato Institute: Policy Analysis* No. 798: 1, 2016.
- Global Commission on International Migration. "Migration in an interconnected World: New Directions for Action." Geneva: Switzerland, 2005.
- Sharafat Al Ayman. "Attitudes of the United States' Presidents Towards Immigration: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump." *RSA Journal*, Vol. 30: 53-67, 2019.
- US Department of Justice, Office of Public Affairs. 2018. "Attorney General Sessions Delivers Remarks Discussing the Immigration Enforcement Actions of the Trump Administration."
- US Department of Justice, Office of the Inspector General. 2021. "Review of the Department of Justice's Planning and Implementation of Its Zero Tolerance Policy and Its Coordination with the Departments of Homeland Security and Health and Human Services."
- UNICEF. 2018. "Uprooted in Central America and Mexico: Migrant and Refugee Children Face A Vicious Cycle of Hardship and Danger." *UNICEF Child Alert Report*
- United Nations High Commissioner for Refugees (2016). "Children on the

Run – Unaccompanied Children Leaving Central America and Mexico
and the Need for International Protection"

-